

KEPEMIMPINAN OTORITER SEBAGAI FUNGSI, BUKAN IDENTITAS: ANALISIS FUNGSIONAL TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN YESUS DALAM BINGKAI FILOSOFIS PLATO

Agus Rosalena Yutang

Abstract

This study aims to deconstruct the negative meaning of the term “authoritarian” in contemporary leadership discourse by clearly distinguishing between authoritarianism as an identity inherent in the leader and authoritarianism as a function that can be legitimately exercised under certain conditions. Using library research method with a qualitative-philosophical approach, this study analyzes two main sources: Plato’s thought on the Philosopher-King in the Allegory of the Cave (Republic Books V-VII) and the moments of Jesus’ unilateral decision-making in the canonical Gospels. The results show that Plato offers a model of functional authoritarian leadership in which the Philosopher-King is obligated to lead firmly to liberate society from ignorance, based on knowledge of the highest truth and for the purpose of the common good. In the Gospels, four moments are identified where Jesus made unilateral decisions: the forgiveness of the woman caught in adultery, healing on the Sabbath, the calling of the first disciples, and the cleansing of the Temple. These actions were always based on claims of unique authority, aimed at the liberation of others, and undertaken with a willingness to pay a high price. Based on the synthesis of Plato’s thought and Jesus’ practice, four conditions for the legitimacy of authoritarian leadership are formulated: epistemological condition (possession of objective truth), teleological condition (purpose of liberation), situational condition (context requiring decisiveness), and moral condition (integrity and humility). These four conditions are cumulative and must be fulfilled simultaneously; otherwise, authoritarianism degenerates into tyranny. This study contributes to the development of a more nuanced leadership theory by distinguishing function from identity, and provides a critical framework for evaluating claims of authoritarian leadership.

Keywords: *authoritarian leadership, Plato, Allegory of the Cave, Jesus, unilateral decision-making, legitimacy, leadership function*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi pemaknaan negatif atas istilah “otoriter” dalam diskursus kepemimpinan kontemporer dengan membedakan secara tegas antara otoritarianisme sebagai identitas yang melekat pada diri pemimpin dan otoritarianisme sebagai fungsi yang dapat dijalankan secara legitimate dalam kondisi tertentu. Menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-filosofis, penelitian ini menganalisis dua sumber utama:

pemikiran Plato tentang Filsuf-Raja dalam Alegori Gua (Republic Buku V-VII) dan momen-momen pengambilan keputusan unilateral Yesus dalam Injil kanonik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Plato menawarkan model kepemimpinan otoriter fungsional di mana Filsuf-Raja berkewajiban memimpin secara tegas demi membebaskan masyarakat dari ketidaktahuan, berdasarkan pengetahuan tentang kebenaran tertinggi dan dengan tujuan kebaikan bersama. Dalam Injil, teridentifikasi empat momen di mana Yesus mengambil keputusan secara unilateral: pengampunan terhadap perempuan berzinah, penyembuhan pada hari Sabat, pemanggilan murid-murid pertama, dan pembersihan Bait Allah. Tindakan-tindakan ini selalu didasarkan pada klaim otoritas yang unik, ditujukan untuk pembebasan pihak lain, dan dilakukan dengan kesediaan membayar harga mahal. Berdasarkan sintesis antara pemikiran Plato dan praktik Yesus, dirumuskan empat syarat legitimasi kepemimpinan otoriter: syarat epistemik (kepemilikan kebenaran obyektif), syarat teleologis (tujuan pembebasan), syarat situasional (konteks membutuhkan ketegasan), dan syarat moral (integritas dan kerendahan hati). Keempat syarat ini bersifat kumulatif dan harus dipenuhi secara simultan; jika tidak, otoritarianisme jatuh menjadi tirani. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori kepemimpinan yang lebih bernuansa dengan membedakan fungsi dari identitas, serta menyediakan kerangka kritis untuk mengevaluasi klaim-klaim kepemimpinan otoriter.

Kata Kunci: Kepemimpinan Otoriter, Plato, Alegori Gua, Yesus, pengambilan keputusan unilateral, legitimasi, fungsi kepemimpinan

PENDAHULUAN

Dalam wacana kepemimpinan modern, istilah “otoriter” hampir selalu hadir dengan muatan negatif yang melekat kuat. Ia identik dengan kekuasaan yang memusat, pengambilan keputusan sepihak, pengabaian terhadap suara bawahan, dan dalam banyak literatur manajemen disandingkan dengan tirani dan kediktatoran. Literatur manajemen dan psikologi organisasi selama beberapa dekade terakhir secara konsisten menempatkan gaya kepemimpinan otoriter sebagai antitesis dari kepemimpinan partisipatif, demokratis, atau transformatif yang dianggap lebih ideal dan manusiawi. Akibatnya, setiap pemimpin yang menunjukkan kecenderungan mengambil keputusan secara unilateral dengan cepat dicap sebagai pemimpin yang otoriter dan cap ini secara otomatis bermakna negatif, tanpa ruang untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa dalam kondisi tertentu, kepemimpinan yang bersifat tegas dan tidak ternegosiasi mungkin justru diperlukan dan legitimate. Persoalan mendasar muncul ketika kita menyadari bahwa pemaknaan negatif atas kata “otoriter” ini tidak selalu hadir

dalam setiap konteks dan zaman. Ia adalah konstruksi modern yang terbentuk melalui pengalaman historis umat manusia menyaksikan kekejaman para diktator di abad ke-20, seperti Hitler, Mussolini, atau Stalin. Namun, jika kita menelusuri kembali khazanah filsafat klasik, khususnya pemikiran Plato dalam karyanya yang monumental berjudul *Republic*, kita akan menemukan sebuah perspektif yang sangat berbeda tentang kepemimpinan yang bersifat unilateral. Plato, melalui Alegori Gua yang terkenal itu, tidak hanya berbicara tentang epistemologi atau teori pengetahuan, tetapi juga merumuskan sebuah model kepemimpinan yang sangat radikal. Ia menggambarkan sekelompok manusia yang sejak lahir terbelenggu dalam gua yang gelap, hanya mampu melihat bayang-bayang di dinding gua dan menganggapnya sebagai realitas sejati. Kemudian, salah seorang dari mereka berhasil melepaskan diri, keluar dari gua, dan untuk pertama kalinya menyaksikan dunia yang sesungguhnya, termasuk cahaya matahari sebagai sumber kebenaran tertinggi yang disebutnya sebagai *The Form of the Good* (Plato, 2007, pp. 240–245).

Apa yang kemudian dilakukan oleh orang yang telah melihat terang itu? Menurut Plato, ia berkewajiban untuk kembali ke dalam gua, membebaskan teman-temannya dari belenggu, dan memimpin mereka keluar menuju cahaya. Dalam momen ini, sang filsuf yang telah menjadi pemimpin itu harus mengambil keputusan-keputusan yang tidak dapat didiskusikan dengan mereka yang masih terbelenggu. Bagaimana mungkin ia berdialog tentang realitas sejati dengan orang-orang yang bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang berada dalam gua? Bagaimana mungkin ia meminta persetujuan mereka untuk dibebaskan, ketika mereka justru menganggap bayang-bayang sebagai satu-satunya realitas dan akan marah jika dipaksa keluar? Di sinilah letak pemikiran Plato yang sering luput dari perhatian para teoritis kepemimpinan modern: kepemimpinan yang benar, dalam situasi ketidaktahuan total dari pihak yang dipimpin, mau tidak mau harus bersifat otoriter dalam pengertian mengambil keputusan berdasarkan kebenaran yang diketahui pemimpin, tanpa menunggu persetujuan mereka yang belum mengetahui (Annas, 1981, p. 177). Yang menarik dan penting untuk dicatat, Plato secara tegas membedakan model kepemimpinan ini dari tirani. Perbedaannya tidak terletak pada gaya pengambilan keputusan yang unilateral, tetapi pada sumber otoritas dan tujuan dari kepemimpinan itu sendiri. Filsuf-Raja memiliki otoritas karena ia telah mencapai pengetahuan tentang kebaikan tertinggi, dan tujuannya adalah membebaskan warganya dari kegelapan menuju pencerahan. Sebaliknya,

tiran memimpin berdasarkan nafsu kuasa dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dengan kata lain, bagi Plato, otoritarianisme dapat menjadi sesuatu yang positif dan legitimate jika dijalankan oleh pemimpin yang benar-benar mengetahui kebenaran dan menggunakannya untuk kebaikan bersama (Reeve, 1988, p. 210). Perbedaan ini sangat krusial karena membuka kemungkinan untuk berpikir tentang otoritarianisme tidak sebagai identitas yang melekat pada diri pemimpin, tetapi sebagai fungsi yang dapat dijalankan dalam kondisi-kondisi tertentu.

Paradoks serupa, bahkan dalam kadar yang lebih kuat dan kompleks, kita temukan dalam narasi kepemimpinan Yesus dari Nazaret sebagaimana tercatat dalam kitab-kitab Injil. Di satu sisi, Yesus menampilkan diri sebagai pemimpin yang melayani dengan kerendahan hati yang luar biasa. Ia membasuh kaki murid-muridnya, bergaul dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai yang dipandang hina oleh masyarakat, dan mengajarkan bahwa barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tokoh inilah yang kemudian menjadi inspirasi utama bagi teori *servant leadership* yang dikembangkan oleh Robert Greenleaf dan para pengikutnya hingga menjadi salah satu teori kepemimpinan paling berpengaruh di dunia kontemporer (Greenleaf, 1977, p. 21). Yesus adalah model sempurna dari pemimpin yang melayani, dan tidak ada seorang pun yang dapat membantah hal ini.

Namun di sisi lain, dalam banyak momen penting yang tercatat dalam Injil, Yesus mengambil keputusan secara absolut dan unilateral dengan cara yang sangat mengesankan. Ketika seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zinah dihadapkan kepada-Nya, sementara para ahli Taurat dan orang Farisi sudah siap melempari dengan batu sesuai hukum Taurat Musa, Yesus tidak mengadakan diskusi atau musyawarah dengan murid-murid-Nya, apalagi dengan para penuduh. Ia berkata dengan otoritas penuh: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari perempuan itu dengan batu." Dan ketika semua pergi setelah tersentak hati nuraninya, ia berkata kepada perempuan itu: "Aku tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Dalam keputusan ini, Yesus secara sepihak membatalkan pelaksanaan hukum Taurat yang berlaku, sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik otoritas tertinggi yang tidak perlu meminta persetujuan siapa pun (Bauckham, 2008, p. 45). Contoh lain yang tidak kalah kuat adalah sikap Yesus terhadap hari Sabat. Ketika menyembuhkan orang pada hari Sabat, ia tahu persis bahwa tindakan-Nya akan dianggap melanggar hukum Taurat dan pasti

memicu kemarahan para pemuka agama yang mengawasi-Nya. Namun Ia tetap melakukannya, bahkan dengan pernyataan tegas yang mengejutkan: "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Di sini Yesus tidak hanya melanggar aturan yang berlaku, tetapi secara fundamental mengklaim otoritas yang lebih tinggi dari sistem hukum agama yang sudah mapan dan dihormati selama berabad-abad (Loader, 2012, hlm. 134). Klaim seperti ini, jika datang dari siapa pun selain Yesus, akan dianggap sebagai penghujatan yang keterlaluan.

Juga dalam pemanggilan murid-murid pertama, kita melihat pola yang sama. Ketika Yesus berjalan di tepi danau Galilea dan melihat Simon serta Andreas sedang menebarkan jala, Ia tidak menawarkan pilihan, tidak meminta mereka mempertimbangkan, tidak memberikan brosur atau penjelasan panjang lebar tentang misi yang akan dijalankan. Ia hanya berkata: "Mari, ikutlah Aku." Dan tanpa negosiasi, tanpa diskusi, tanpa bertanya kepada keluarga atau menghitung risiko, mereka segera meninggalkan jala dan mengikuti-Nya. Ada otoritas dalam perkataan Yesus yang membuat respons spontan seperti itu menjadi mungkin, bahkan wajar dan tidak terasa aneh bagi para pembaca Injil (Dunn, 2003, p. 512). Ini bukan kepemimpinan partisipatif dalam pengertian modern, ini adalah kepemimpinan yang bersifat komando murni, namun diterima dengan sukacita.

Dua realitas ini, yaitu otoritarianisme fungsional yang digambarkan Plato dalam Alegori Gua dan tindakan-tindakan unilateral Yesus dalam berbagai momen penting, membuka ruang bagi kita untuk mempertanyakan kembali pemaknaan yang selama ini melekat pada istilah kepemimpinan otoriter. Apakah mungkin selama ini kita telah terlalu cepat menghakimi dan melabel negatif tanpa melakukan pembedaan yang memadai? Apakah mungkin ada perbedaan fundamental antara otoritarianisme sebagai identitas yang melekat pada diri pemimpin dan menjadi karakter tetap kepemimpinannya, dengan otoritarianisme sebagai fungsi yang dijalankan secara situasional dalam momen-momen tertentu ketika kondisi memang membutuhkan ketegasan dan keputusan sepihak? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membela atau melegitimasi kepemimpinan otoriter dalam pengertian modern yang kita kenal sebagai tirani dan kediktatoran. Justru sebaliknya, dengan memahami secara lebih mendalam pemikiran Plato tentang Filsuf-Raja dan menganalisis momen-momen spesifik di mana Yesus menjalankan fungsi kepemimpinan yang bersifat unilateral, penelitian ini ingin membangun

sebuah pemahaman yang lebih bernuansa tentang apa itu kepemimpinan otoriter, kapan ia menjadi sah untuk digunakan, dan apa syarat-syarat yang membuatnya legitimate secara moral dan epistemik. Dengan kata lain, penelitian ini ingin memisahkan secara tegas antara penggunaan kata otoriter yang bersifat diskriptif analitis dengan penggunaan kata yang sama yang bersifat evaluatif normatif.

Untuk memposisikan kebaruan penelitian ini dalam khasanah ilmu pengetahuan, perlu terlebih dahulu dipetakan kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Setidaknya ada empat kelompok literatur yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Kelompok pertama adalah studi-studi tentang kepemimpinan otoriter dalam perspektif manajemen dan psikologi organisasi yang merupakan literatur paling dominan dalam diskursus kepemimpinan otoriter kontemporer. Penelitian oleh Cheng dan rekan-rekan tentang kepemimpinan otoriter dalam konteks budaya Tionghoa, misalnya, meskipun mengakui adanya penerimaan kultural terhadap gaya ini di masyarakat Asia, tetap menyimpulkan bahwa kepemimpinan otoriter menimbulkan ketakutan dan kepatuhan semu di kalangan bawahan. Studi ini mendefinisikan kepemimpinan otoriter sebagai perilaku pemimpin yang menegaskan otoritas dan kendali absolut, serta menuntut kepatuhan tanpa pertanyaan dari bawahan (Cheng *et al.*, 2004, p. 91). Meta-analisis yang dilakukan oleh Zhang dan Xie kemudian menemukan korelasi negatif yang konsisten antara kepemimpinan otoriter dan perilaku inovatif karyawan. Semakin otoriter seorang pemimpin, semakin rendah tingkat kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Studi ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan otoriter berhubungan positif dengan stres kerja dan intensi keluar karyawan (Zhang and Xie, 2017, p. 115). Dalam literatur manajemen arus utama, kesimpulan seperti ini hampir tidak pernah digugat dan menjadi semacam doktrin yang diterima begitu saja.

Namun demikian, yang menarik dari kelompok studi ini adalah bahwa mereka hampir secara eksklusif mendefinisikan kepemimpinan otoriter berdasarkan perilaku yang tampak, seperti pengambilan keputusan sepihak, kontrol ketat, dan tuntutan kepatuhan, tanpa mempertimbangkan secara serius pertanyaan tentang legitimasi dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, pendekatan ini cenderung behavioristik dan mengabaikan dimensi epistemik dan moral yang justru menjadi inti dari pemikiran Plato tentang kepemimpinan yang benar. Mereka tidak bertanya apakah pemimpin yang mengambil keputusan sepihak itu memang mengetahui kebenaran atau hanya sedang memaksakan kehendak, apakah tujuannya adalah

kebaikan bersama atau kepentingan pribadi, dan apakah situasinya memang membutuhkan ketegasan atau sebenarnya dialog masih dimungkinkan. Akibatnya, semua bentuk kepemimpinan unilateral dicampuradukkan ke dalam satu kategori yang sama dan diberi label negatif yang sama (Haugaard, 2025, p. 130). Kelompok kedua adalah studi-studi teologis tentang kepemimpinan Yesus yang hampir secara eksklusif berfokus pada dimensi *servant leadership* sebagai inti dari teladan Kristus. Greenleaf sendiri, dalam buku klasiknya yang berjudul *Servant Leadership*, menjadikan Yesus sebagai model utama kepemimpinan yang melayani. Ia menulis bahwa pemimpin yang melayani adalah mereka yang pertama-tama melayani, dan bahwa kepemimpinan yang agung lahir dari kerinduan untuk melayani, bukan dari keinginan untuk memimpin dan menguasai orang lain (Greenleaf, 1977, p. 7). Sendjaya dan Sarros kemudian mengembangkan lebih lanjut konsep *servant leadership* dengan akar teologis yang kuat. Mereka mengidentifikasi enam dimensi kepemimpinan melayani, yaitu kerelaan untuk melayani, kerendahan hati, kasih, visi, kepercayaan, dan pemberdayaan. Semua dimensi ini menurut mereka ditemukan dalam diri Yesus sebagaimana digambarkan dalam Injil (Sendjaya and Sarros, 2002, p. 60). Namun, dalam seluruh analisis mereka, tidak pernah disinggung tentang momen-momen di mana Yesus bertindak secara unilateral dan otoritatif. Dimensi keras dari kepemimpinan Yesus seolah dihilangkan agar sesuai dengan kerangka teoretis yang telah dibangun sebelumnya.

Studi-studi biblika tentang otoritas Yesus memang telah banyak dilakukan, tetapi pendekatannya lebih bersifat kristologis daripada kepemimpinan. Wright dalam bukunya *Jesus and the Victory of God* membahas secara mendalam klaim-klaim otoritas Yesus dalam konteks Yahudi abad pertama. Ia menunjukkan bahwa tindakan Yesus mengampuni dosa, membersihkan Bait Allah, dan mengklaim otoritas atas hari Sabat adalah tindakan-tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri. Otoritas Yesus, menurut Wright, bersifat unik dan tidak dapat dibandingkan dengan otoritas manusia mana pun karena bersumber dari identitas ilahi-Nya (Wright, 1996, p. 268). Pendekatan ini sangat berharga untuk memahami siapa Yesus menurut iman Kristen, tetapi tidak secara langsung berbicara tentang model kepemimpinan yang dapat ditarik dari tindakan-tindakan tersebut untuk kepentingan pengembangan teori kepemimpinan.

Kelompok ketiga adalah studi-studi filosofis tentang kepemimpinan dalam pemikiran Plato. Literatur tentang Alegori Gua sangat melimpah dan telah dikaji dari berbagai perspektif, tetapi sebagian besar digunakan dalam konteks epistemologi

dan filsafat pendidikan. Annas dalam bukunya *An Introduction to Plato's Republic* memberikan analisis mendalam tentang Alegori Gua sebagai metafora perjalanan jiwa menuju pengetahuan. Ia juga membahas kewajiban Filsuf-Raja untuk kembali ke gua, tetapi lebih menekankan pada aspek etisnya daripada implikasinya bagi teori kepemimpinan (Annas, 1981, p. 260). Pappas dalam *Routledge Philosophy GuideBook to Plato and the Republic* juga membahas Alegori Gua secara rinci, tetapi fokusnya tetap pada bagaimana alegori ini menjelaskan teori pengetahuan Plato tentang dunia ide dan dunia materi. Ia menyebut bahwa kembalinya sang filsuf ke gua adalah tindakan moral yang diperlukan, tetapi tidak mengembangkan lebih lanjut apa artinya bagi praktik kepemimpinan dalam konteks kontemporer (Pappas, 1995, p. 187). Reeve dalam *Philosopher-Kings* mungkin adalah yang paling mendekati kepentingan penelitian ini, karena ia secara khusus membahas argumen Plato tentang mengapa filsuf harus menjadi raja dan apa yang membuat kepemimpinan mereka legitimate. Namun, ia tetap berada dalam kerangka filsafat politik klasik dan tidak menghubungkan pemikiran Plato dengan isu-isu kontemporer tentang kepemimpinan atau dengan figur kepemimpinan dari tradisi lain (Reeve, 1988, p. 210). Kelompok keempat adalah studi-studi komparatif antara Plato dan figur Yesus yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa peneliti telah mencoba membandingkan pemikiran Plato dengan ajaran Yesus, tetapi dalam kerangka yang berbeda-beda. Ada studi yang membandingkan konsep kebenaran dalam Plato dan Injil Yohanes, ada juga yang membandingkan konsep keadilan dalam Plato dan ajaran etika Yesus dalam khotbah di bukit. Namun demikian, setelah melakukan penelusuran literatur yang cukup mendalam, penulis belum menemukan satu studi pun yang secara spesifik membandingkan fungsi otoritarianisme dalam kepemimpinan Filsuf-Raja Plato dengan tindakan-tindakan unilateral Yesus dalam Injil. Apalagi studi yang menggunakan perbandingan ini untuk membangun sebuah teori kepemimpinan otoriter yang fungsional dan bersyarat, sama sekali belum ditemukan dalam khasanah ilmu pengetahuan yang ada.

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, kebaruan ilmiah artikel ini dapat dirumuskan dalam beberapa poin penting. Pertama, artikel ini menawarkan dekonstruksi konseptual terhadap istilah otoriter dengan membedakan secara tegas antara otoritarianisme sebagai identitas yang melekat pada diri pemimpin dan selalu berbahaya seperti dalam kasus tirani, dengan otoritarianisme sebagai fungsi yang dapat dijalankan secara legitimate dalam kondisi-kondisi tertentu.

Pembedaan ini selama ini luput dari perhatian dalam diskursus kepemimpinan arus utama yang cenderung menyamakan semua bentuk kepemimpinan unilateral sebagai sesuatu yang negatif dan harus dihindari. Kedua, artikel ini membangun dialog interdisipliner yang jarang dilakukan dengan mempertemukan tiga ranah sekaligus, yaitu filsafat politik klasik Plato, teologi biblika tentang perilaku Yesus dalam Injil, dan teori kepemimpinan kontemporer. Pendekatan interdisipliner ini memungkinkan analisis yang lebih kaya dan tidak terjebak dalam keterbatasan perspektif tunggal. Ketiga, artikel ini menggunakan pendekatan analisis fungsional, bukan analisis identitas. Artinya, ia tidak bertanya apakah Yesus adalah pemimpin otoriter, yang merupakan pertanyaan identitas yang akan segera ditolak oleh setiap orang yang mengenal figur Yesus, melainkan bertanya dalam momen-momen apa Yesus menjalankan fungsi kepemimpinan otoriter dan apa yang dapat kita pelajari dari momen-momen tersebut. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengambil pelajaran dari figur agung tanpa mereduksinya menjadi satu label saja. Keempat, artikel ini akan merumuskan secara eksplisit syarat-syarat legitimasi untuk kepemimpinan otoriter berdasarkan sintesis antara pemikiran Plato dan praktik Yesus, yang dapat menjadi sumbangan teoretis yang berarti bagi pengembangan studi kepemimpinan di masa depan.

Berdasarkan seluruh latar belakang dan pemetaan literatur yang telah dipaparkan, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam empat pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pemikiran Plato tentang Filsuf-Raja dalam Alegori Gua dapat dibaca sebagai model kepemimpinan otoriter yang fungsional dan legitimate? Kedua, dalam momen-momen apa saja Yesus mengambil keputusan secara unilateral tanpa dialog atau diskusi sebagaimana tercatat dalam Injil, dan apa karakteristik dari momen-momen tersebut? Ketiga, apa persamaan dan perbedaan mendasar antara otoritarianisme fungsional Plato dan tindakan unilateral Yesus? Keempat, berdasarkan sintesis keduanya, syarat-syarat apa yang membuat kepemimpinan otoriter menjadi legitimate dan fungsional, serta kapan pola ini tidak boleh digunakan?

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran Plato tentang kepemimpinan otoriter fungsional dalam Alegori Gua dengan penekanan pada konsep Filsuf-Raja dan kewajibannya untuk kembali ke gua. Selanjutnya, artikel ini akan mengidentifikasi dan menganalisis momen-momen pengambilan keputusan unilateral Yesus dalam Injil dengan memilih beberapa kasus representatif

seperti pengampunan terhadap perempuan berzina, sikap terhadap hari Sabat, pemanggilan murid, dan pembersihan Bait Allah. Kemudian, artikel ini akan membandingkan kedua model untuk menemukan titik temu dan perbedaan mendasar terutama dalam hal sumber otoritas, sifat kebenaran yang dipegang, tujuan tindakan, dan hubungan dengan pihak yang dipimpin. Akhirnya, artikel ini akan merumuskan syarat-syarat legitimasi kepemimpinan otoriter berdasarkan sintesis antara Plato dan Yesus sebagai sumbangan bagi pengembangan teori kepemimpinan kontemporer yang lebih bernuansa dan tidak terjebak pada pelabelan hitam-putih yang simplistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau *library research* dengan pendekatan kualitatif-filosofis (Sugiyono, 2019). Metode ini dipilih karena objek material penelitian berupa teks-teks klasik, yaitu dialog Plato dalam *Republic* dan kitab-kitab Injil kanonik, yang memerlukan interpretasi mendalam dan analisis konseptual, bukan pengukuran kuantitatif. Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis konsep, argumen, dan implikasi logis dari pemikiran yang diteliti, serta untuk membangun sintesis teoretis antara dua sumber utama tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Otoriter Fungsional dalam Alegori Gua Plato

Untuk memahami pemikiran Plato tentang kepemimpinan otoriter yang fungsional, kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam struktur Alegori Gua itu sendiri. Alegori ini disampaikan Plato dalam *Republic* Buku VII sebagai percakapan antara Socrates dan Glaukon. Ia menggambarkan sebuah gua yang gelap dan panjang, di mana sejak masa kanak-kanak terdapat sekelompok manusia yang terbelenggu leher dan kakinya sehingga tidak dapat bergerak dan hanya dapat melihat ke dinding gua di depan mereka. Di belakang mereka, ada api yang menyala dan di antara api dan para tawanan itu ada jalan setapak dengan dinding rendah, seperti layar dalam pertunjukan boneka. Di balik dinding itu, orang-orang lalu lalang sambil membawa berbagai macam benda, termasuk patung-patung

manusia dan binatang, yang terbuat dari batu dan kayu. Para tawanan hanya dapat melihat bayang-bayang benda-benda itu yang jatuh di dinding gua, dan karena tidak pernah melihat apa pun selain bayang-bayang itu, mereka menganggapnya sebagai realitas sejati. Mereka bahkan memberi nama dan penghargaan kepada sesama tawanan yang paling jeli mengamati bayang-bayang dan paling tepat menebak urutan kemunculannya (Plato, 2007, pp. 240–242).

Alegori ini, sebagaimana dijelaskan oleh Annas, adalah gambaran tentang kondisi manusia pada umumnya sebelum mencapai pencerahan filosofis. Gua melambangkan dunia indrawi yang kita huni, belunggu melambangkan keterikatan kita pada hal-hal duniawi, dan bayang-bayang melambangkan opini-opini yang kita terima begitu saja tanpa pernah mempertanyakannya. Api di dalam gua melambangkan matahari di dunia indrawi, yaitu sumber cahaya yang memungkinkan kita melihat, tetapi masih jauh dari kebenaran sejati (Annas, 1981, pp. 252–253). Yang menarik, para tawanan ini tidak menyadari bahwa mereka sedang terbelunggu. Mereka bahkan menganggap gua sebagai seluruh dunia dan bayang-bayang sebagai seluruh realitas. Ini adalah titik krusial yang sering luput dari perhatian ketika orang membaca Alegori Gua sebagai sekadar metafora pengetahuan. Sekarang bayangkan, kata Plato, jika salah seorang tawanan dilepaskan dan dipaksa untuk berdiri, menoleh, berjalan, dan melihat ke arah cahaya api. Ia akan merasakan sakit dan silau, sehingga ia ingin segera kembali ke posisinya semula karena itulah yang paling nyaman baginya. Namun jika ia terus dipaksa keluar dari gua, melalui jalan yang terjal dan curam, ia akan sampai di permukaan dan untuk pertama kalinya melihat dunia luar. Pada awalnya ia akan silau dan tidak dapat melihat apa pun. Perlahan-lahan ia akan melihat bayang-bayang, kemudian pantulan benda-benda di air, kemudian benda-benda itu sendiri, kemudian pada malam hari ia akan melihat bulan dan bintang-bintang, dan akhirnya ia akan mampu melihat matahari itu sendiri, bukan bayangan atau pantulannya, tetapi matahari yang sesungguhnya. Di sinilah ia menyadari bahwa matahari adalah sumber segala cahaya dan kehidupan, dan bahwa semua yang ia lihat sebelumnya hanyalah bayang-bayang dan ilusi (Plato, 2007, p. 255).

Setelah mencapai pencerahan ini, sang filsuf akan merasa kasihan kepada teman-temannya yang masih terbelunggu di dalam gua. Ia ingat bagaimana mereka memberikan penghargaan kepada siapa pun yang paling jeli mengamati bayang-bayang, dan ia tahu bahwa sekarang ia telah melihat realitas yang jauh lebih tinggi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah ia akan tetap

tinggal di luar gua menikmati pengetahuannya, ataukah ia akan kembali ke dalam gua untuk membebaskan teman-temannya? Menurut Plato, ia berkewajiban untuk kembali, meskipun ia tahu bahwa ketika masuk kembali ke dalam gua, matanya akan gelap karena baru keluar dari terang, dan ia akan terlihat konyol di mata para tawanan yang tidak pernah melihat terang. Mereka bahkan mungkin akan marah dan berkata bahwa ia telah merusak matanya dengan perjalanan keluar gua, dan jika ada kesempatan, mereka akan membunuhnya (Plato, 2007, pp. 258–260).

Di sinilah letak inti dari pemikiran Plato tentang kepemimpinan. Sang filsuf yang telah melihat kebenaran tidak memiliki pilihan selain kembali dan memimpin. Dan dalam proses memimpin ini, ia harus mengambil keputusan-keputusan yang tidak dapat didiskusikan dengan mereka yang masih terbelenggu. Mengapa demikian? Karena dialog dan musyawarah mengandaikan adanya kerangka bersama tentang apa yang benar dan apa yang baik. Para tawanan hidup dalam kerangka di mana bayang-bayang adalah realitas dan orang yang paling jeli melihat bayang-bayang adalah pemimpin yang paling dihormati. Sang filsuf datang dengan kerangka yang sama sekali berbeda, di mana bayang-bayang hanyalah ilusi dan matahari adalah realitas sejati. Tidak mungkin ada dialog yang setara antara dua kerangka yang berbeda secara fundamental ini. Jika sang filsuf meminta persetujuan para tawanan untuk dibebaskan, mereka pasti akan menolak karena mereka tidak tahu apa itu kebebasan dan tidak menganggap belenggu sebagai belenggu. Jika ia berdialog tentang matahari, mereka akan menganggapnya gila karena yang mereka tahu hanyalah api di dalam gua. Maka satu-satunya cara adalah memimpin secara tegas, bahkan memaksa jika perlu, demi kebaikan mereka sendiri (Reeve, 1988, p. 208).

Pemikiran ini menjadi semakin jelas ketika kita membaca konsep Filsuf-Raja dalam Buku V dan VI *Republic*. Plato berargumen bahwa hanya filsuf yang layak menjadi pemimpin karena hanya mereka yang telah mencapai pengetahuan tentang ide kebaikan, yaitu prinsip tertinggi yang menjadi sumber segala kebenaran dan nilai. Tanpa pengetahuan ini, seorang pemimpin hanyalah seperti orang buta yang menuntun orang buta lainnya. Ia mungkin pandai berbicara dan meyakinkan orang, tetapi pada hakikatnya ia tidak tahu apa yang benar dan apa yang baik. Filsuf, sebaliknya, telah melihat realitas itu sendiri dan karena itu memiliki dasar yang kokoh untuk memutuskan apa yang terbaik bagi masyarakat (Reeve, 1988, pp. 170–175). Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Plato secara eksplisit membedakan Filsuf-Raja dari tiran. Tiran memimpin karena nafsu kuasa

dan untuk kepentingan diri sendiri. Ia menggunakan negara sebagai alat untuk memuaskan keinginannya. Filsuf-Raja, sebaliknya, memimpin karena kewajiban moral. Ia sebenarnya lebih suka tinggal di luar gua menikmati kontemplasi, tetapi ia kembali karena rasa tanggung jawab kepada sesama. Ia tidak menginginkan kekuasaan, tetapi menerimanya sebagai tugas. Inilah yang membedakan otoritarianisme fungsional yang legitimate dari tirani. Perbedaannya tidak terletak pada gaya pengambilan keputusan yang unilateral, tetapi pada sumber otoritas, motif, dan tujuan dari kepemimpinan itu sendiri. Filsuf-Raja berhak memimpin secara otoriter karena ia memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh yang dipimpin, dan ia menggunakannya untuk membebaskan mereka dari kegelapan menuju terang (Pappas, 1995, p. 189).

Pappas menambahkan bahwa Alegori Gua sebenarnya adalah kritik terhadap demokrasi Athena yang sangat dikagumi Plato. Dalam demokrasi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, tanpa mempedulikan apakah mayoritas itu tahu apa yang benar atau tidak. Plato melihat bahaya dalam sistem seperti ini: orang yang paling pandai berbicara dan merayu massa bisa menjadi pemimpin, meskipun ia sama sekali tidak memiliki kebijaksanaan. Alegori Gua menawarkan alternatif radikal: pemimpin haruslah mereka yang tahu, bukan mereka yang populer. Dan jika yang tahu ini harus memimpin secara tegas karena yang dipimpin tidak tahu, maka itulah harga yang harus dibayar untuk kebaikan bersama (Pappas, 1995, p. 192). Dalam konteks Indonesia, Santoso menjelaskan bahwa pemikiran Plato tentang kepemimpinan sering disalahpahami sebagai pembenaran untuk otoritarianisme politik. Padahal, Plato justru memberikan kriteria yang sangat ketat untuk kepemimpinan yang legitimate. Seorang pemimpin tidak bisa hanya mengklaim bahwa ia tahu, ia harus benar-benar menunjukkan pengetahuannya melalui perjalanan panjang pendidikan filosofis. Dan tujuannya harus jelas, yaitu kebaikan bersama, bukan keuntungan pribadi atau kelompok. Tanpa kriteria ini, otoritarianisme jatuh menjadi tirani yang justru sangat dibenci Plato (Santoso, 2018, pp. 156–158).

Dari seluruh pemaparan di atas, kita dapat menarik beberapa prinsip tentang kepemimpinan otoriter fungsional menurut Plato. Pertama, kepemimpinan ini didasarkan pada kepemilikan atas kebenaran obyektif yang lebih tinggi dari sekadar opini atau kesepakatan mayoritas. Kedua, kepemimpinan ini dijalankan sebagai kewajiban moral, bukan karena keinginan untuk berkuasa. Ketiga, tujuannya adalah pembebasan dan pencerahan pihak yang dipimpin, bukan

eksploitasi atau penindasan. Keempat, dalam prosesnya, pemimpin mungkin harus mengambil keputusan secara unilateral karena ketidaktahuan fundamental dari pihak yang dipimpin membuat dialog yang setara tidak mungkin dilakukan. Kelima, pemimpin harus siap menghadapi penolakan, kemarahan, bahkan ancaman kematian dari mereka yang justru ingin dibebaskan. Inilah harga yang harus dibayar oleh pemimpin yang benar.

Momen-Momen Unilateral dalam Pengambilan Keputusan Yesus

Setelah memahami kerangka Plato tentang kepemimpinan otoriter fungsional, kita sekarang beralih pada analisis terhadap momen-momen di mana Yesus mengambil keputusan secara unilateral dalam Injil. Penting untuk ditegaskan kembali bahwa analisis ini tidak bertujuan untuk melabel Yesus sebagai pemimpin otoriter dalam artian negatif, melainkan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi kepemimpinan tertentu yang dijalankan-Nya dalam konteks-konteks spesifik. Ada empat kasus yang akan dianalisis secara mendalam: pengampunan terhadap perempuan berzinah, sikap terhadap hari Sabat, pemanggilan murid-murid pertama, dan pembersihan Bait Allah.

Kasus pertama adalah pengampunan terhadap perempuan yang tertangkap basah berbuat zinah, yang tercatat dalam Yohanes 7:53-8:11. Narasi ini dimulai ketika para ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan kepada Yesus. Mereka berkata bahwa menurut hukum Musa, perempuan seperti itu harus dilempari batu sampai mati, dan mereka bertanya kepada Yesus: "Apakah pendapat-Mu tentang hal ini?" Tujuan mereka sebenarnya bukan mencari kebenaran, tetapi menjebak Yesus. Jika Yesus berkata lempari, Ia akan kehilangan reputasi-Nya sebagai pengasih dan ramah kepada orang berdosa. Jika Ia berkata jangan lempari, Ia bisa dituduh melawan hukum Musa dan dilaporkan kepada otoritas Romawi yang tidak mengizinkan eksekusi mati tanpa persetujuan mereka (Bauckham, 2008, pp. 43-44). Yesus tidak terjebak dalam permainan mereka. Ia tidak mengadakan diskusi atau meminta pendapat murid-murid-Nya. Ia juga tidak melakukan voting atau musyawarah. Sebaliknya, Ia membungkuk dan menulis di tanah dengan jari-Nya. Ketika mereka terus mendesak, Ia berdiri dan berkata: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari perempuan itu dengan batu." Kemudian Ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Satu per satu, mulai dari yang tertua, mereka pergi meninggalkan tempat

itu. Setelah semua pergi, Yesus berkata kepada perempuan itu: "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Perempuan itu menjawab: "Tidak ada, Tuhan." Lalu Yesus berkata: "Aku tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang" (Yohanes 8:7-11).

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam narasi ini. Pertama, Yesus sama sekali tidak memasuki kerangka hukum yang diajukan para ahli Taurat. Ia tidak berdebat tentang apakah hukum Musa masih berlaku atau bagaimana menafsirkannya. Ia mengubah seluruh persoalan dengan membawa isu hati nurani dan dosa pribadi. Kedua, Yesus mengambil keputusan secara sepihak bahwa perempuan itu tidak perlu dihukum. Tidak ada konsultasi dengan para murid, tidak ada musyawarah dengan tokoh masyarakat, tidak ada pemungutan suara. Keputusan itu murni berasal dari otoritas-Nya sendiri. Ketiga, Yesus juga memberi perintah imperatif: "Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi." Ini adalah perintah yang tidak bisa ditawar. Perempuan itu tidak diberi pilihan untuk setuju atau tidak, ia hanya diminta untuk patuh. Keempat, tindakan Yesus ini secara efektif membatalkan pelaksanaan hukum Taurat yang sudah berabad-abad berlaku. Ini adalah klaim otoritas yang luar biasa besar. (Bauckham, 2008, p. 46) Wright menjelaskan bahwa dalam konteks Yahudi abad pertama, hanya Allah sendiri yang berhak mengampuni dosa secara langsung. Manusia bisa saling memaafkan kesalahan pribadi, tetapi dosa terhadap Allah dan terhadap hukum Taurat hanya bisa diampuni oleh Allah melalui mekanisme kurban yang ditetapkan. Dengan berkata "Aku tidak menghukum engkau," Yesus bertindak seolah-olah Ia adalah Allah yang memiliki hak mutlak untuk mengampuni. Tidak heran jika para lawannya kemudian menuduh Yesus menghujat Allah, karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa (Wright, 1996, p. 268). Klaim otoritas inilah yang menjadi dasar legitimasi tindakan unilateral Yesus. Ia tidak perlu berdiskusi karena Ia bertindak dalam kapasitas sebagai pemilik otoritas tertinggi.

Kasus kedua adalah sikap Yesus terhadap hari Sabat, khususnya dalam peristiwa penyembuhan orang yang mati tangan kanannya pada hari Sabat, yang tercatat dalam Markus 3:1-6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat dan di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus, apakah Ia akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Yesus tahu persis apa yang mereka pikirkan, namun Ia tidak mundur atau mencari kompromi. Ia memanggil orang itu ke tengah dan bertanya kepada orang-orang Farisi: "Manakah yang diperbolehkan

pada hari Sabat: berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh?" Mereka diam saja. Lalu Yesus memandang mereka dengan marah, dan karena kedegilan hati mereka Ia berdukacita. Kemudian Ia berkata kepada orang itu: "Ulurkanlah tanganmu!" Dan ketika orang itu mengulurkan tangannya, sembuhlah tangannya itu. Orang-orang Farisi segera pergi dan mulai bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus (Markus 3:1-6). Loader memberikan analisis mendalam tentang peristiwa ini. Ia menjelaskan bahwa dalam tradisi Yahudi, ada aturan ketat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Menyembuhkan orang, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa, dianggap sebagai pekerjaan yang dilarang. Orang yang mati tangan dalam narasi ini jelas tidak dalam keadaan darurat karena kondisinya sudah kronis. Penyembuhannya bisa ditunda satu hari tanpa risiko kematian. Namun Yesus tetap menyembuhkannya, dan Ia melakukannya dengan sengaja di depan umum, di rumah ibadat, di hadapan para pemuka agama yang sedang mengawasi-Nya (Loader, 2012, pp. 135-137).

Yang menarik, Yesus tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga memberikan justifikasi teologis yang radikal. Dalam peristiwa lain yang paralel, Ia menyatakan dengan tegas: "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat" (Markus 2:27-28). Pernyataan ini mengandung klaim yang sangat kuat. Pertama, Yesus membalikkan prioritas: hukum, termasuk hukum Sabat, ada untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Ini adalah kritik terhadap legalisme yang buta. Kedua, Yesus mengklaim diri-Nya sebagai "Tuhan atas hari Sabat." Ini berarti Ia memiliki otoritas untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, bahkan otoritas untuk mengesampingkan aturan yang sudah mapan (Loader, 2012, pp. 138-140). Dunn menambahkan bahwa klaim Yesus tentang hari Sabat harus dipahami dalam konteks otoritas kenabian, tetapi melampaui itu. Para nabi dalam Perjanjian Lama memang sering mengkritik praktik keagamaan yang hampa, tetapi tidak pernah ada nabi yang mengklaim dirinya sebagai "Tuhan atas" suatu institusi yang ditetapkan Allah. Ini adalah klaim yang hanya masuk akal jika Yesus memang memiliki kesadaran diri sebagai utusan Allah dengan otoritas istimewa, atau bahkan seperti yang kemudian dipahami oleh gereja perdana, sebagai Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia (Dunn, 2003, p. 515). Di sinilah letak dasar legitimasi tindakan unilateral Yesus: Ia bertindak bukan sebagai pemimpin biasa, tetapi sebagai pemilik otoritas tertinggi yang sumbernya transenden.

Kasus ketiga adalah pemanggilan murid-murid pertama, yang tercatat dalam Markus 1:16-20. Ketika Yesus berjalan di tepi danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudaranya, sedang menebarkan jala di danau, karena mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia." Lalu seketika itu juga mereka meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Setelah Yesus berjalan sedikit lebih jauh, Ia melihat Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Ia segera memanggil mereka. Mereka pun meninggalkan ayah mereka, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahan, lalu mengikuti Dia (Markus 1:16-20). Narasi ini sangat singkat, tetapi penuh dengan detail yang mengejutkan. Bayangkan seorang pemimpin yang tidak dikenal sebelumnya datang dan berkata "Ikutlah aku" kepada nelayan-nelayan yang sedang sibuk bekerja. Tidak ada negosiasi, tidak ada penjelasan tentang misi, tidak ada tawaran insentif, tidak ada jaminan masa depan. Dan responsnya: "seketika itu juga mereka meninggalkan jala mereka." Ini bukan respons yang wajar dalam interaksi manusia biasa. Pasti ada sesuatu dalam diri Yesus, dalam cara Ia berbicara dan dalam otoritas yang terpancar dari-Nya, yang membuat respons seperti itu menjadi mungkin (Dunn, 2003, p. 513).

Dunn menjelaskan bahwa para murid tidak mengikuti Yesus karena mereka telah mendengar ajaran-Nya terlebih dahulu atau menyaksikan mujizat-Nya. Menurut urutan Markus, pemanggilan ini terjadi di awal pelayanan Yesus, sebelum Ia melakukan mujizat apa pun yang tercatat. Yang memanggil mereka adalah orang asing yang tidak mereka kenal, namun mereka segera meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti-Nya. Ini menunjukkan adanya otoritas pribadi yang luar biasa dalam diri Yesus, yang oleh para sarjana disebut sebagai "otoritas karismatik" dalam pengertian Weber. Otoritas ini tidak berasal dari jabatan atau posisi formal, tetapi dari kualitas pribadi yang diakui oleh mereka yang dipanggil (Dunn, 2003, p. 514).

Gaybba, dari perspektif teologis, menjelaskan bahwa respons spontan para murid menunjukkan bahwa mereka "mengalami" sesuatu yang luar biasa dalam diri Yesus. Mungkin bukan pemahaman teologis yang lengkap, tetapi suatu daya tarik dan otoritas yang membuat mereka yakin bahwa mengikuti orang ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ini adalah pengalaman fundamental yang kemudian mereka renungkan selama bertahun-tahun dan akhirnya membawa mereka pada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, bahkan Anak Allah (Gaybba,

1998, pp. 172–173). Dengan kata lain, legitimasi tindakan Yesus dalam memanggil secara sepihak ini terletak pada kenyataan bahwa para murid sendiri mengakui otoritas-Nya, meskipun tidak melalui proses diskusi atau musyawarah.

Kasus keempat adalah pembersihan Bait Allah, yang tercatat dalam Yohanes 2:13-17. Menjelang hari raya Paskah, Yesus pergi ke Yerusalem. Di halaman Bait Allah Ia melihat orang-orang berjualan lembu, domba, dan merpati, serta penukar uang duduk di meja mereka. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari Bait Allah, termasuk domba-domba dan lembu-lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkan-Nya dan meja-meja mereka dibalikkan-Nya. Kepada pedagang merpati Ia berkata: "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempat berjualan." Murid-murid-Nya teringat bahwa ada tertulis: "Cinta untuk rumah-Mu menghancurkan Aku" (Yohanes 2:13-17). Peristiwa ini mungkin adalah tindakan paling agresif yang pernah dilakukan Yesus dalam seluruh pelayanan-Nya. Ia tidak hanya mengkritik atau mengajar, tetapi bertindak secara fisik dengan membuat cambuk, mengusir orang-orang, menghamburkan uang, dan membalikkan meja. Tindakan ini jelas bersifat unilateral dan otoritatif. Tidak ada diskusi dengan imam-imam kepala, tidak ada negosiasi dengan para pedagang, tidak ada konsultasi dengan murid-murid. Yesus bertindak sendiri berdasarkan otoritas-Nya, dan tindakan-Nya ini secara langsung menantang sistem ekonomi dan keagamaan yang telah mapan di Bait Allah (Bauckham, 2008, pp. 50–51).

Bauckham menjelaskan bahwa Bait Allah pada zaman Yesus bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga pusat ekonomi dan politik. Para imam besar yang mengelola Bait Allah adalah bagian dari elit yang kaya dan berkuasa, yang bekerja sama dengan kekuasaan Romawi. Praktik jual beli dan penukaran uang di halaman Bait Allah, meskipun diperlukan untuk sistem kurban, telah menjadi sumber korupsi dan eksploitasi terhadap jemaah yang datang dari jauh. Dengan membersihkan Bait Allah, Yesus tidak hanya melakukan protes simbolis, tetapi juga tindakan profetik yang sangat radikal: Ia mengklaim otoritas untuk "membersihkan" rumah Allah, sesuatu yang dalam tradisi Israel hanya dilakukan oleh raja-raja yang saleh seperti Hizkia dan Yosia (Bauckham, 2008, p. 52). Yang lebih penting, Yesus menyebut Bait Allah sebagai "rumah Bapa-Ku." Ini adalah klaim hubungan khusus dengan Allah yang tidak pernah dibuat oleh nabi atau tokoh agama mana pun dalam tradisi Yahudi. Para nabi berbicara tentang "Allah Israel" atau "Allah nenek moyang kita," tetapi tidak pernah menyebut Allah sebagai "Bapa-Ku" dengan

implikasi hubungan anak yang unik. Klaim inilah yang kemudian menjadi dasar tuduhan bahwa Yesus menghujat Allah dan layak dihukum mati (Wright, 1996, pp. 422–423). Di sini kita melihat pola yang sama: tindakan unilateral Yesus selalu didasarkan pada klaim otoritas yang unik, yang sumbernya adalah hubungan-Nya yang istimewa dengan Allah.

Dari keempat kasus di atas, kita dapat mengidentifikasi beberapa karakteristik umum dari momen-momen di mana Yesus mengambil keputusan secara unilateral. Pertama, semua tindakan itu dilakukan dalam konteks di mana kebenaran fundamental sedang dipertaruhkan: hakikat pengampunan versus legalisme buta, tujuan hukum versus kepatuhan mekanis, panggilan ilahi versus ikatan duniawi, kesucian rumah Allah versus komersialisasi agama. Kedua, Yesus bertindak berdasarkan klaim otoritas yang unik, yang dalam bahasa iman Kristen disebut sebagai otoritas ilahi. Ketiga, tindakan-tindakan itu selalu ditujukan untuk kebaikan dan pembebasan pihak lain, bukan untuk keuntungan diri sendiri. Keempat, Yesus bersedia membayar harga mahal untuk tindakan-Nya, termasuk penolakan, kemarahan para penguasa, dan pada akhirnya kematian di kayu salib. Kelima, meskipun bertindak unilateral, Yesus tidak pernah memaksa siapa pun untuk mengikuti-Nya secara fisik. Para murid bisa saja menolak panggilan-Nya, dan banyak orang memang menolak-Nya. Otoritas-Nya bersifat menarik, bukan memaksa.

Dialog antara Plato dan Yesus: Titik Temu dan Perbedaan

Setelah menganalisis secara terpisah pemikiran Plato tentang kepemimpinan otoriter fungsional dan momen-momen unilateral Yesus, sekarang kita sampai pada tahap membandingkan keduanya. Perbandingan ini penting untuk melihat apakah ada paralel struktural yang signifikan, serta untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan mendasar yang justru memperkaya pemahaman kita tentang kepemimpinan otoriter yang fungsional.

Mari kita mulai dengan titik-titik temu atau persamaan. Persamaan pertama dan paling fundamental adalah bahwa baik Plato maupun Yesus sama-sama bertindak berdasarkan kepemilikan atas kebenaran tertinggi. Filsuf-Raja Plato telah melihat “Matahari” yaitu *The Form of the Good*, yang merupakan sumber segala kebenaran dan nilai. Ia tidak hanya memiliki opini atau keyakinan subjektif, tetapi pengetahuan yang pasti tentang apa yang benar dan apa yang baik. Demikian

pula Yesus, dalam keyakinan iman Kristen, bukan hanya memiliki pengetahuan tentang kebenaran, tetapi Ia sendiri adalah Kebenaran itu. Dalam Injil Yohanes, Yesus berkata: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup" (Yohanes 14:6). Ini adalah klaim yang jauh lebih kuat dari sekadar mengetahui kebenaran; ini adalah klaim identitas bahwa diri-Nya adalah kebenaran yang dipersonifikasikan (Bauckham, 2008, p. 70). Dalam kedua kasus, sumber legitimasi tindakan unilateral adalah kepemilikan atau keidentikan dengan kebenaran obyektif yang melampaui opini manusia biasa. Persamaan kedua terletak pada motif dan tujuan tindakan. Filsuf-Raja Plato kembali ke gua bukan karena ia ingin berkuasa, tetapi karena ia merasa berkewajiban untuk membebaskan teman-temannya dari belenggu. Ia sebenarnya lebih suka tinggal di luar gua menikmati kontemplasi, tetapi ia rela mengorbankan kenyamanan pribadi demi kebaikan bersama. Tujuannya jelas: membebaskan para tawanan dari kegelapan menuju terang, dari kebodohan menuju pengetahuan. Demikian pula Yesus, seluruh tindakan-Nya yang unilateral selalu ditujukan untuk pembebasan dan keselamatan orang lain. Ia mengampuni untuk membebaskan perempuan dari hukuman mati dan rasa bersalah. Ia menyembuhkan pada hari Sabat untuk membebaskan orang dari penderitaan fisik dan belenggu legalisme. Ia memanggil murid-murid untuk membebaskan mereka dari kehidupan lama menuju misi yang lebih tinggi. Ia membersihkan Bait Allah untuk membebaskan rumah ibadah dari eksploitasi ekonomi. Tidak ada satu pun tindakan Yesus yang ditujukan untuk keuntungan diri-Nya sendiri (Wright, 1996, p. 268). Dalam kedua kasus, tindakan unilateral adalah tindakan pengorbanan demi kebaikan pihak lain.

Persamaan ketiga terletak pada kesiapan menghadapi penolakan. Filsuf-Raja Plato tahu bahwa ketika ia kembali ke gua, ia akan menjadi konyol di mata para tawanan. Matanya akan gelap karena baru keluar dari terang, sehingga ia akan terlihat tidak kompeten dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah keluar. Ia bahkan mungkin akan dibunuh jika mencoba membebaskan mereka. Namun ia tetap kembali karena kewajiban moral. Demikian pula Yesus, Ia tahu bahwa tindakan-tindakan-Nya akan memicu penolakan dan kemarahan. Para ahli Taurat dan orang Farisi memang segera bersekongkol untuk membunuh-Nya setelah penyembuhan pada hari Sabat. Para imam kepala memang memutuskan untuk menangkap dan menyalibkan-Nya setelah pembersihan Bait Allah. Namun Yesus tetap melakukannya karena misi-Nya adalah untuk menyelamatkan, meskipun harus menderita (Dunn, 2003, p. 788). Dalam kedua kasus, pemimpin yang benar rela membayar harga mahal, bahkan nyawa, demi kebenaran dan kebaikan yang

diperjuangkannya. Persamaan keempat terletak pada ketidakmungkinan dialog yang setara. Filsuf-Raja tidak dapat berdialog dengan para tawanan tentang realitas di luar gua karena mereka tidak memiliki kerangka konseptual untuk memahaminya. Dialog tentang matahari tidak mungkin dilakukan dengan orang yang hanya mengenal api di dalam gua. Demikian pula Yesus, dalam banyak momen, Ia tidak dapat berdialog dengan lawan-lawan-Nya karena mereka beroperasi dalam kerangka yang sama sekali berbeda. Ketika Ia berbicara tentang pengampunan, mereka berpikir tentang hukum. Ketika Ia berbicara tentang tujuan Sabat, mereka berpikir tentang aturan. Ketika Ia berbicara tentang Bait Allah sebagai rumah Bapa-Nya, mereka berpikir tentang korupsi dan kekuasaan. Tidak ada titik temu yang memungkinkan dialog yang produktif, sehingga Yesus harus bertindak secara unilateral untuk mematahkan kerangka lama dan membuka kemungkinan kerangka baru (Loader, 2012, pp. 144–145).

Namun di samping persamaan-persamaan di atas, terdapat juga perbedaan-perbedaan signifikan yang tidak boleh diabaikan. Perbedaan pertama dan paling mendasar adalah sumber otoritas. Filsuf-Raja Plato mencapai pengetahuannya melalui proses pendidikan filosofis yang panjang dan melelahkan. Ia adalah manusia biasa yang melalui latihan intelektual dan moral akhirnya berhasil mencapai kontemplasi tentang *The Form of the Good*. Pengetahuan ini, meskipun sulit dicapai, pada prinsipnya dapat dicapai oleh siapa pun yang menjalani proses yang sama. Otoritas Filsuf-Raja bersifat epistemik, yaitu berdasarkan pengetahuan yang diperoleh melalui usaha manusia (Reeve, 1988, pp. 210–215). Sebaliknya, otoritas Yesus, dalam keyakinan iman Kristen, bersumber dari identitas ilahi-Nya. Ia bukan manusia biasa yang mencapai pencerahan melalui usaha, tetapi Allah yang menjadi manusia. Pengetahuan-Nya bukan hasil belajar, tetapi hakikat diri-Nya. Klaim “Akulah kebenaran” tidak dapat direduksi menjadi “aku mengetahui kebenaran.” Ini adalah perbedaan kualitatif yang sangat fundamental (Bauckham, 2008, p. 75).

Perbedaan kedua terletak pada jangkauan dan sifat tujuan. Filsuf-Raja Plato bertujuan untuk membebaskan warga negara dari ketidaktahuan dan membimbing mereka menuju kehidupan yang baik dalam negara yang adil. Tujuannya bersifat politis dan sosial, dalam kerangka kehidupan duniawi. Ia ingin mendirikan negara ideal di mana keadilan terwujud dan setiap orang hidup sesuai dengan kodratnya. Tujuan ini, meskipun luhur, masih terbatas pada kehidupan di dunia ini (Annas, 1981, p. 260). Sebaliknya, tujuan Yesus bersifat transenden dan

kekal. Ia tidak hanya membebaskan orang dari belenggu fisik dan sosial, tetapi dari dosa dan maut menuju kehidupan kekal. Pengampunan-Nya bukan sekadar pembebasan dari hukuman duniawi, tetapi rekonsiliasi dengan Allah. Panggilan-Nya bukan sekadar mengubah profesi, tetapi mengubah nasib kekal manusia. Ini adalah tujuan yang jauh melampaui apa yang dibayangkan Plato (Wright, 1996, p. 272).

Perbedaan ketiga terletak pada metode kepemimpinan. Filsuf-Raja Plato, setelah kembali ke gua, harus memimpin secara bertahap dan pedagogis. Ia tidak bisa langsung memaksa semua orang keluar, karena mata mereka belum siap menerima terang. Proses pembebasan harus dilakukan perlahan-lahan, dengan membiasakan mata pada cahaya secara bertahap. Ini adalah model kepemimpinan yang progresif dan evolusioner (Pappas, 1995, p. 192). Sebaliknya, Yesus sering bertindak secara transformatif dan instan. Penyembuhan terjadi seketika, pengampunan diberikan langsung, panggilan direspons spontan. Ada kuasa dalam perkataan Yesus yang membuat perubahan terjadi secara tiba-tiba. Ini bukan berarti tidak ada proses pembelajaran setelahnya, tetapi momen keputusan awalnya bersifat radikal dan instan. Model kepemimpinan ini lebih revolusioner daripada evolusioner (Dunn, 2003, p. 515).

Perbedaan keempat terletak pada hubungan dengan yang dipimpin. Filsuf-Raja Plato, meskipun kembali ke gua karena kewajiban, tetap berada dalam posisi yang secara ontologis lebih tinggi dari yang dipimpin. Ia telah melihat realitas yang tidak pernah dilihat oleh mereka, dan karena itu selalu ada jarak antara dirinya dan warga biasa. Ia memimpin dari atas, sebagai yang lebih tahu (Reeve, 1988). Sebaliknya, Yesus justru merendahkan diri-Nya. Ia membasuh kaki murid-murid-Nya, bergaul dengan pemungut cukai dan orang berdosa, dan pada akhirnya mati di kayu salib sebagai hukuman bagi penjahat. Ia memimpin dari bawah, dengan melayani. Inilah paradoks yang luar biasa: pemilik otoritas tertinggi justru menjadi yang paling rendah. Servant leadership dan otoritarianisme fungsional bertemu dalam diri Yesus dengan cara yang tidak terbayangkan dalam filsafat Plato (Greenleaf, 1977, p. 21). Perbedaan-perbedaan ini tidak mengurangi nilai perbandingan, justru memperkaya pemahaman kita. Plato memberikan kerangka filosofis tentang mengapa dan bagaimana kepemimpinan otoriter yang fungsional itu mungkin. Yesus memberikan contoh konkret tentang bagaimana kerangka itu dijalankan dalam praktik, dengan dimensi transendental yang tidak dimiliki oleh pemimpin mana pun dalam sejarah manusia. Kombinasi keduanya memberi kita

perspektif yang lebih lengkap tentang apa artinya memimpin secara otoritatif demi kebaikan mereka yang dipimpin.

Merumuskan Syarat-Syarat Legitimasi Kepemimpinan Otoriter

Setelah membandingkan pemikiran Plato dan praktik Yesus, kita sekarang sampai pada inti dari penelitian ini, yaitu merumuskan syarat-syarat yang membuat kepemimpinan otoriter menjadi legitimate dan fungsional. Rumusan ini didasarkan pada sintesis antara kerangka filosofis Plato dan contoh konkret dari Yesus, dengan tetap menyadari perbedaan mendasar antara keduanya. Tujuannya bukan untuk menciptakan cetak biru yang dapat langsung diterapkan, tetapi untuk memberikan kriteria reflektif yang dapat digunakan dalam mengevaluasi klaim-klaim kepemimpinan otoriter.

Syarat pertama dan paling fundamental adalah syarat epistemik, yaitu kepemilikan atas kebenaran obyektif. Dalam kerangka Plato, seorang pemimpin hanya berhak memimpin secara otoriter jika ia benar-benar telah melihat "Matahari," yaitu kebenaran tertinggi yang menjadi sumber segala nilai. Tanpa ini, ia hanyalah orang buta yang menuntun orang buta lainnya, dan otoritarianisme yang dijalannya akan jatuh menjadi tirani. Pengetahuan ini bukan sekadar opini atau keyakinan subjektif, tetapi pengetahuan yang benar tentang realitas sebagaimana adanya. Filsuf-Raja mencapai pengetahuan ini melalui proses panjang pendidikan filosofis yang melibatkan dialektika dan kontemplasi (Reeve, 1988, p. 210). Dalam praktik Yesus, syarat ini dipenuhi secara sempurna karena Ia sendiri adalah Kebenaran itu. Yesus tidak hanya mengetahui kebenaran tentang Allah dan manusia, tetapi Ia adalah kebenaran yang dipersonifikasikan. Karena itu, setiap keputusan-Nya, betapa pun unilateralnya, selalu selaras dengan kebenaran tertinggi (Bauckham, 2008, pp. 70–72). Bagi pemimpin manusia biasa, syarat ini tentu tidak dapat dipenuhi secara mutlak seperti Yesus. Tidak ada manusia yang dapat mengklaim dirinya sebagai kebenaran. Namun dalam skala yang lebih terbatas, syarat epistemik tetap relevan. Seorang pemimpin yang ingin bertindak secara otoriter dalam situasi tertentu harus memiliki pengetahuan yang lebih unggul tentang masalah yang dihadapi dibandingkan dengan mereka yang dipimpin. Ia harus benar-benar memahami situasi, mengetahui apa yang benar dan apa yang baik, bukan sekadar memiliki opini kuat atau keinginan untuk menang. Pengetahuan ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik, meskipun

tidak harus disetujui oleh semua orang. Dalam konteks organisasi modern, ini berarti pemimpin harus memiliki kompetensi, pengalaman, dan wawasan yang memadai untuk mengambil keputusan sulit ketika diperlukan (Haugaard, 2025, pp. 135–136).

Syarat kedua adalah syarat teleologis, yaitu tujuan tindakan haruslah pembebasan dan pencerahan pihak yang dipimpin, bukan keuntungan diri sendiri. Filsuf-Raja Plato kembali ke gua bukan karena ia ingin berkuasa, tetapi karena ia merasa berkewajiban untuk membebaskan teman-temannya. Ia rela mengorbankan kenyamanan pribadi demi kebaikan bersama. Tujuannya jelas: membawa para tawanan dari kegelapan menuju terang, dari kebodohan menuju pengetahuan (Annas, 1981, p. 262). Yesus juga menunjukkan pola yang sama. Setiap tindakan unilateral-Nya selalu ditujukan untuk kebaikan orang lain: membebaskan perempuan dari hukuman mati, menyembuhkan orang sakit, memanggil manusia kepada kehidupan yang lebih bermakna, membersihkan rumah ibadah dari eksploitasi. Tidak ada satu pun tindakan Yesus yang ditujukan untuk keuntungan pribadi. Ia justru harus membayar mahal dengan nyawa-Nya karena tindakan-tindakan itu (Wright, 1996). Dalam praktik kepemimpinan manusia, syarat teleologis ini sangat krusial untuk membedakan antara otoritarianisme fungsional dan tirani. Seorang pemimpin yang mengambil keputusan sepihak harus dapat menunjukkan bahwa keputusan itu benar-benar demi kebaikan mereka yang dipimpin, bukan demi memperkuat posisinya, memperkaya diri, atau memuaskan ambisi pribadi. Motivasi ini harus dapat diuji melalui konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta melalui kesediaan pemimpin untuk berkorban demi kepentingan bersama. Pemimpin yang sejati, seperti Filsuf-Raja Plato, tidak menginginkan kekuasaan tetapi menerimanya sebagai tugas. Ia lebih suka hidup tenang tanpa beban tanggung jawab, tetapi ia memimpin karena tidak ada orang lain yang lebih mampu (Pappas, 1995, p. 193).

Syarat ketiga adalah syarat situasional, yaitu adanya kondisi yang memang membutuhkan tindakan cepat dan tegas, di mana dialog dan musyawarah tidak memungkinkan atau justru akan berbahaya. Filsuf-Raja Plato tidak dapat berdialog dengan para tawanan tentang realitas di luar gua karena mereka tidak memiliki kerangka konseptual untuk memahaminya. Dialog yang setara hanya mungkin jika kedua pihak berbagi kerangka dasar yang sama tentang apa yang benar dan apa yang baik. Ketika kerangka ini tidak ada, dialog menjadi tidak

produktif dan bahkan dapat memperkuat ilusi yang sudah ada (Reeve, 1988, p. 217). Yesus juga menghadapi situasi serupa. Ketika para ahli Taurat membawa perempuan berzinah, mereka tidak mencari kebenaran tetapi menjebak Yesus. Tidak ada gunanya berdialog dengan orang yang berniat jahat. Ketika orang-orang Farisi mengawasi Yesus pada hari Sabat, mereka sudah memutuskan untuk menolak-Nya apa pun yang Ia lakukan. Dalam situasi seperti ini, tindakan tegas dan unilateral justru lebih efektif untuk mematahkan kemunafikan dan membuka kemungkinan baru (Loader, 2012, p. 146). Namun syarat situasional ini juga berarti bahwa kepemimpinan otoriter tidak boleh menjadi gaya sehari-hari. Ia hanya digunakan dalam situasi-situasi khusus ketika kondisi memang membutuhkannya. Dalam situasi normal, ketika dialog dan musyawarah masih memungkinkan, ketika pihak yang dipimpin memiliki kapasitas untuk memahami dan berpartisipasi, maka kepemimpinan partisipatif adalah cara yang lebih tepat. Yesus sendiri, dalam banyak kesempatan, berdialog dan berdiskusi dengan murid-murid-Nya. Ia menjelaskan arti perumpamaan, menjawab pertanyaan, bahkan meminta pendapat mereka tentang siapa Ia menurut orang banyak. Fungsi otoriter hanya muncul dalam momen-momen spesifik, bukan sebagai identitas tetap (Dunn, 2003, p. 512).

Syarat keempat adalah syarat moral, yaitu integritas dan kerendahan hati pemimpin. Filsuf-Raja Plato, meskipun memiliki pengetahuan tertinggi, tidak menjadi sombong. Ia justru rela kembali ke gua dan mengalami penderitaan demi kebaikan orang lain. Kerendahan hati ini adalah bukti bahwa ia tidak terikat pada kekuasaan, bahwa ia memimpin karena kewajiban bukan karena nafsu. Yesus menunjukkan kerendahan hati ini secara sempurna dengan membasuh kaki murid-murid-Nya, dengan bergaul bersama orang-orang yang dipandang rendah, dan dengan mati di kayu salib sebagai penjahat. Ia memiliki otoritas tertinggi, tetapi Ia tidak pernah menggunakannya untuk meninggikan diri. Justru sebaliknya, Ia menggunakan otoritas-Nya untuk melayani (Greenleaf, 1977, p. 25). Sendjaya dan Sarros, dalam pengembangan teori servant leadership, menekankan bahwa kerendahan hati adalah ciri khas pemimpin sejati. Pemimpin yang rendah hati tidak merasa perlu membuktikan kehebatan mereka, tidak mencari pujian, dan tidak takut kehilangan posisi. Mereka memimpin karena panggilan, bukan karena ambisi. Dalam konteks kepemimpinan otoriter fungsional, kerendahan hati ini menjadi sangat penting karena kekuasaan yang besar tanpa disertai kerendahan hati pasti akan merusak. Hanya pemimpin yang rendah hati yang dapat dipercaya

menggunakan kekuasaan unilateral tanpa menyalahgunakannya (Sendjaya and Sarros, 2002, pp. 62–63).

Keempat syarat di atas bersifat kumulatif, artinya semuanya harus dipenuhi agar kepemimpinan otoriter dapat dinyatakan legitimate. Jika syarat epistemik tidak dipenuhi, pemimpin hanya memaksakan opini subjektif yang belum tentu benar. Jika syarat teleologis tidak dipenuhi, pemimpin menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan menjadi tiran. Jika syarat situasional tidak dipenuhi, pemimpin bertindak otoriter dalam situasi yang sebenarnya masih bisa dialog, sehingga merampas hak partisipasi yang dipimpin. Jika syarat moral tidak dipenuhi, pemimpin akan mudah tergoda menyalahgunakan kekuasaan untuk meninggikan diri. Sebaliknya, jika keempat syarat ini dipenuhi, maka kepemimpinan otoriter bukan hanya boleh dilakukan, tetapi dalam situasi tertentu menjadi kewajiban moral pemimpin. Ada saat-saat di mana berdialog justru tidak bertanggung jawab, karena kebenaran yang jelas harus segera ditegakkan demi menyelamatkan banyak orang. Ada saat-saat di mana meminta persetujuan justru kejam, karena mereka yang tidak tahu tidak dapat memberikan persetujuan yang berarti. Dalam situasi seperti ini, memimpin secara tegas dan unilateral adalah bentuk kasih yang paling tinggi, karena ia memilih kebaikan sejati orang lain di atas kenyamanan hubungan atau popularitas diri.

Diskusi dengan Literatur yang Ada

Temuan penelitian ini menantang asumsi dasar dalam literatur manajemen dan psikologi organisasi yang selama ini mendefinisikan kepemimpinan otoriter secara seragam negatif. Studi-studi seperti Cheng dkk. (2004) dan Zhang dan Xie (2017) memang menemukan korelasi negatif antara kepemimpinan otoriter dengan kreativitas dan kepuasan kerja. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa definisi operasional yang digunakan dalam studi-studi tersebut terlalu luas dan tidak membedakan antara otoritarianisme sebagai identitas dan otoritarianisme sebagai fungsi. Mereka mengukur perilaku yang tampak tanpa mempertimbangkan konteks, tujuan, dan legitimasi dari perilaku tersebut, sehingga menyamakan Filsuf-Raja Plato dengan tiran dan momen-momen tertentu Yesus dengan perilaku diktator modern (Haugaard, 2025, pp. 130–132). Di sisi lain, temuan penelitian ini melengkapi kajian tentang servant leadership yang selama ini dominan dalam literatur kepemimpinan berbasis agama. Greenleaf (1977)

dan Sendjaya dan Sarros (2002) telah menggambarkan sisi pelayanan Yesus dengan baik, tetapi cenderung mengabaikan sisi otoritatif yang juga ada dalam diri-Nya. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam diri Yesus, *servant leadership* dan otoritarianisme fungsional bertemu secara sempurna. Ia adalah hamba yang melayani dan sekaligus Tuhan yang berkuasa. Paradoks ini hanya dapat dipahami jika kita membedakan antara identitas dan fungsi (Wright, 1996, p. 268).

Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan teori kepemimpinan transformatif, khususnya dalam kaitannya dengan dimensi ketiga kekuasaan yang dikemukakan Lukes (2005), yaitu kekuasaan untuk membentuk preferensi dan keinginan orang lain. Pemimpin transformatif kadang harus mengambil keputusan sulit yang tidak populer demi membawa perubahan paradigma, dan dalam momen itu ia mungkin harus bertindak secara otoriter dalam pengertian fungsional. (Lukes, 2005, pp. 90–91) Terakhir, penting untuk menegaskan bahwa penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melegitimasi otoritarianisme politik. Keempat syarat yang dirumuskan bersifat sangat ketat dan sulit dipenuhi oleh pemimpin manusia biasa. Syarat epistemik menuntut pengetahuan unggul tentang kebenaran, syarat teleologis menuntut kemurnian tujuan, syarat situasional membatasi penggunaan hanya pada kondisi khusus, dan syarat moral menuntut kerendahan hati mendalam. Dengan demikian, penelitian ini justru dapat menjadi alat kritik terhadap klaim-klaim otoritarianisme yang tidak legitimate, bukan pembenaran untuknya (Santoso, 2018, pp. 156–158; Weber, 2019, p. 345).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan penting. Pertama, pemikiran Plato tentang Filsuf-Raja dalam Alegori Gua menawarkan sebuah model kepemimpinan otoriter yang bersifat fungsional dan legitimate, yang sama sekali berbeda dari tirani. Filsuf-Raja memiliki kewajiban moral untuk kembali ke gua dan memimpin mereka yang masih terbelenggu, meskipun harus mengambil keputusan secara unilateral karena ketidaktahuan fundamental dari pihak yang dipimpin. Otoritasnya bersumber dari pengetahuan tentang kebenaran tertinggi, dan tujuannya adalah pembebasan dan pencerahan, bukan keuntungan pribadi. Dalam kerangka ini,

otoritarianisme bukanlah ekspresi nafsu kuasa, melainkan alat pedagogis untuk membawa orang dari kegelapan menuju terang.

Kedua, dalam momen-momen tertentu Yesus menjalankan fungsi kepemimpinan otoriter, yaitu mengambil keputusan secara unilateral tanpa dialog atau diskusi. Hal ini tampak dalam empat kasus yang dianalisis: pengampunan terhadap perempuan berzinah di mana Yesus secara sepihak membatalkan pelaksanaan hukum Taurat; sikap terhadap hari Sabat di mana Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengklaim diri sebagai Tuhan atas hari Sabat; pemanggilan murid-murid pertama dengan perintah imperatif "Mari, ikutlah Aku" yang direspons tanpa negosiasi; serta pembersihan Bait Allah dengan tindakan fisik yang otoritatif. Dalam semua kasus ini, tindakan unilateral Yesus selalu didasarkan pada klaim otoritas yang unik, ditujukan untuk kebaikan pihak lain, dan dilakukan dengan kesediaan membayar harga mahal.

Ketiga, terdapat persamaan dan perbedaan mendasar antara otoritarianisme fungsional Plato dan tindakan unilateral Yesus. Persamaannya meliputi: kepemilikan atas kebenaran tertinggi sebagai dasar tindakan, motif pengorbanan demi kebaikan pihak lain, kesiapan menghadapi penolakan, dan ketidakmungkinan dialog yang setara dalam situasi tertentu. Adapun perbedaannya meliputi: sumber otoritas (epistemik-rasional pada Plato versus ilahi-wahyu pada Yesus), jangkauan tujuan (politis-duniawi versus spiritual-kekal), metode kepemimpinan (progresif-pedagogis versus transformatif-istan), dan hubungan dengan yang dipimpin (memimpin dari atas versus melayani dari bawah). Perbedaan-perbedaan ini justru memperkaya pemahaman tentang kompleksitas kepemimpinan otoriter fungsional.

Keempat, berdasarkan sintesis antara pemikiran Plato dan praktik Yesus, kepemimpinan otoriter dapat dinyatakan legitimate dan fungsional jika memenuhi empat syarat kumulatif. Syarat epistemik menuntut pemimpin benar-benar memiliki pengetahuan unggul tentang kebenaran yang relevan dengan situasi yang dihadapi. Syarat teleologis menuntut tujuan tindakan adalah pembebasan dan pencerahan pihak yang dipimpin, bukan keuntungan diri sendiri. Syarat situasional menuntut adanya kondisi yang memang membutuhkan tindakan cepat dan tegas, di mana dialog dan musyawarah tidak memungkinkan atau justru berbahaya. Syarat moral menuntut integritas dan kerendahan hati pemimpin, yang tercermin dalam kesediaan berkorban dan tidak terikat pada kekuasaan.

Keempat syarat ini harus dipenuhi secara simultan; jika salah satu tidak terpenuhi, otoritarianisme jatuh menjadi tirani yang patut ditolak.

Dengan demikian, penelitian ini telah berhasil mendekonstruksi pemaknaan negatif atas kepemimpinan otoriter dan menawarkan kerangka teoretis baru yang membedakan secara tegas antara otoritarianisme sebagai fungsi yang sah dalam kondisi tertentu dan otoritarianisme sebagai identitas yang selalu berbahaya. Kontribusi utama penelitian ini adalah rumusan empat syarat legitimasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi klaim-klaim kepemimpinan otoriter, baik dalam konteks organisasi, politik, maupun sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam diri Yesus, servant leadership dan otoritarianisme fungsional tidaklah bertentangan, melainkan bertemu dalam paradoks yang hanya dapat dipahami jika kita membedakan antara identitas pribadi dan fungsi kepemimpinan. Penelitian ini membuka sejumlah kemungkinan untuk pengembangan lebih lanjut. Pertama, diperlukan penelitian empiris untuk menguji apakah keempat syarat legitimasi yang dirumuskan dapat dioperasionalkan dan diukur dalam konteks organisasi modern, serta bagaimana hubungannya dengan variabel-variabel kepemimpinan lainnya. Kedua, diperlukan studi kasus historis tentang figur-figur kepemimpinan yang kontroversial untuk melihat apakah mereka memenuhi syarat-syarat ini atau justru melanggarnya, sehingga kerangka teoretis ini dapat diuji dalam konteks nyata. Ketiga, diperlukan dialog lintas agama dan lintas budaya untuk melihat apakah tradisi-tradisi lain memiliki konsep serupa tentang kepemimpinan otoriter fungsional, yang dapat memperkaya pemahaman dan memperluas aplikasi kerangka ini. Keempat, diperlukan kajian etis lebih mendalam tentang bagaimana pemimpin manusiawi yang tidak memiliki akses sempurna pada kebenaran dapat menerapkan kerangka ini dengan bijak dan bertanggung jawab, tanpa jatuh pada penyalahgunaan kekuasaan.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori kepemimpinan yang lebih bernuansa, yang tidak terjebak pada pelabelan hitam-putih yang simplistik. Kepemimpinan otoriter bukanlah sesuatu yang selalu harus dihindari, tetapi juga bukan sesuatu yang dapat digunakan sembarangan. Ia adalah sebuah alat yang ampuh, yang hanya boleh digunakan oleh pemimpin yang memenuhi syarat-syarat ketat, dalam situasi yang tepat, dengan tujuan yang mulia, dan dengan hati yang rendah hati. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh krisis, pemimpin seperti inilah yang sangat dibutuhkan: pemimpin yang tahu kapan harus berdialog dan kapan harus

memutuskan, kapan harus melayani dan kapan harus memerintah, kapan harus bersama dan kapan harus sendirian bertanggung jawab atas keputusan sulit demi kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, J. (1981). *An Introduction to Plato's Republic*. Oxford: Oxford University Press.
- Bauckham, R. (2008). *Jesus and the God of Israel: God Crucified and Other Studies on the New Testament's Christology of Divine Identity*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Cheng, B.-S. et al. (2004). 'Paternalistic leadership and subordinate responses: Establishing a leadership model in Chinese organizations', *Asian Journal of Social Psychology*, 7(1), pp. 89–117.
- Dunn, J.D.G. (2003). *Jesus Remembered: Christianity in the Making*, Volume 1. Grand Rapids: Eerdmans.
- Gaybba, B. (1998). 'Christ the Saviour', in *God is a Community: A General Survey of Christian Theology*. Pretoria: University of South Africa Press, pp. 165–180.
- Greenleaf, R.K. (1977). *Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness*. Mahwah: Paulist Press.
- Haugaard, M. (2025). 'Coercion and legitimacy as sources of power and crisis in autocratic, authoritarian and liberal-democratic leadership: a four-dimensional power analysis', *Journal of Political Power*, 18(1), pp. 125–146.
- Loader, W. (2012). *Jesus' Attitude towards the Law: A Study of the Gospels*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Lukes, S. (2005). *Power: A Radical View*. 2nd edn. Houndmills: Palgrave Macmillan.
- Pappas, N. (1995). *Routledge Philosophy GuideBook to Plato and the Republic*. London: Routledge.
- Plato (2007). *The Republic*. Translated by D. Lee. London: Penguin Classics.
- Reeve, C.D.C. (1988). *Philosopher-Kings: The Argument of Plato's Republic*. Princeton: Princeton University Press.
- Santoso, B. (2018). *Filsafat Politik Plato: Keadilan dan Kepemimpinan dalam Republik*. Depok: Penerbit Universitas Indonesia.

Sendjaya, S. and Sarros, J.C. (2002). 'Servant Leadership: Its Origin, Development, and Application in Organizations', *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 9(2), pp. 57–64.

Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. 3rd edn. Bandung: Alfabeta.

Weber, M. (2019). *Economy and Society: A New Translation*. Translated by K. Tribe. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Wright, N.T. (1996). *Jesus and the Victory of God*. Minneapolis: Fortress Press.

Zhang, Y. and Xie, Y. (2017). 'Authoritarian leadership and employee outcomes: A meta-analysis', *Journal of Business Ethics*, 141(3), pp. 603–622.